

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang yang dapat dilihat dengan peningkatan output, tentunya juga output perkapita, serta adanya daya beli masyarakat yang mencerminkan peningkatan konsumsi barang dan jasa yang bermuara pada kesejahteraan (Syahputra et al., 2017). Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan penting bagi perekonomian nasional maupun regional karena pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator kesejahteraan dan kemajuan suatu wilayah secara keseluruhan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup.

Secara signifikan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan (Lahouij, 2017). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan merupakan dua fenomena yang saling terkait erat. Dua topik ini telah menjadi subjek penelitian dan perdebatan yang luas di antara para ekonom dan pembuat kebijakan. Pandangan umum yang berlaku adalah bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan standar hidup secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi juga dapat menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata, yang mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Setelah satu dekade mengalami stagnasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke kecepatan pertumbuhan sebelum terjadi krisis moneter tetapi tidak lagi berpihak pada kaum miskin (Timmer, 2018). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pertumbuhan *pro-poor growth* yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih menguntungkan masyarakat miskin, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Pendekatan ini melibatkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui program bantuan sosial seperti program keluarga harapan, kartu Indonesia pintar, dan bantuan langsung tunai yang dimulai sejak tahun 2005 dan terus diperluas hingga saat ini. Selain itu, pengembangan infrastruktur di daerah

tertinggal, seperti melalui dana desa yang diluncurkan pada tahun 2015, membantu meningkatkan akses ekonomi dan peluang kerja di wilayah terpencil. Semakin sedikit porsi pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat miskin, semakin tinggi ketimpangan yang terbentuk akibat kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berpihak kepada masyarakat miskin jika kaum miskin mendapat manfaat pertumbuhan ekonomi relatif lebih banyak daripada orang kaya (Ravallion, 2005).

Ketimpangan pendapatan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata cenderung menurunkan kesejahteraan sosial karena fungsi utilitas individu terhadap pendapatan. Ketika pendapatan tidak merata, masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah sering kali menghadapi keterbatasan terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan yang berkualitas dapat sehingga dapat menghambat mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja modern. Sehingga berakibat kurangnya potensi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Redistribusi yang adil dan efektif dapat membantu memulihkan potensi kesejahteraan ini dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk berkembang, sambil tetap mempertahankan insentif untuk berusaha dan berinovasi. Namun jika kebijakan ini dijalankan, redistribusi akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan lebih banyak uang (Herzer & Vollmer, 2012)

Ketimpangan pendapatan juga memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana ketimpangan yang tinggi akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi akan mengalami pertumbuhan yang tidak efisien dalam mengurangi kemiskinan (Wahiba & Weriemmi, 2014). Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Meskipun teori klasik menyoroti efek negatif ketimpangan pendapatan bagi pembangunan ekonomi, disisi lain ketimpangan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan melalui efek insentif (Forbes, 2000). Ketika terdapat perbedaan dalam tingkat pendapatan, individu memiliki motivasi yang lebih besar untuk bekerja lebih keras,

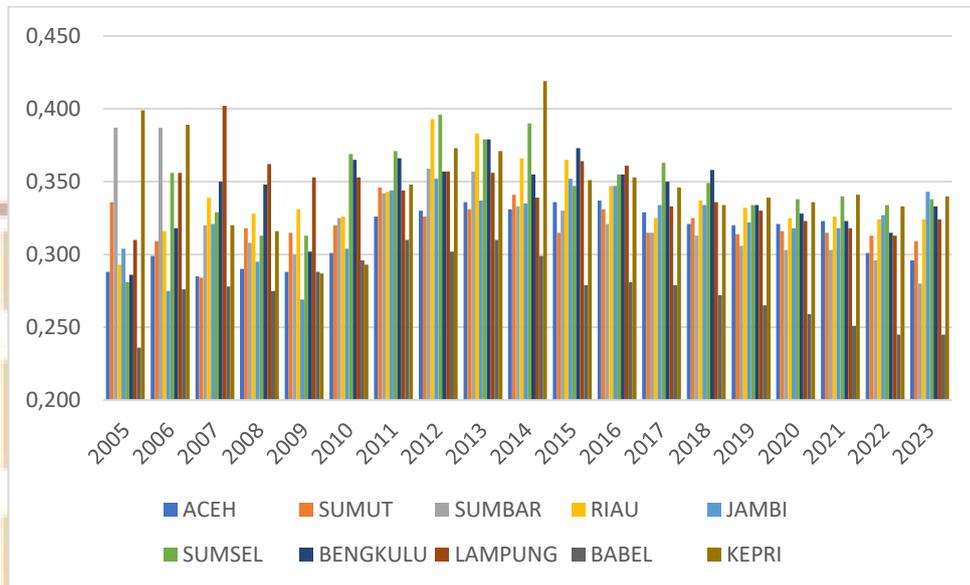
meningkatkan keterampilan, dan berinovasi demi mencapai status ekonomi yang lebih baik. Misalnya, adanya imbalan yang signifikan untuk pekerjaan yang lebih sulit atau lebih membutuhkan keterampilan dapat mendorong orang untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Dampak positif ketimpangan ini hanya berlaku jika ketimpangan berada pada tingkat yang terkendali dan sistem ekonomi memungkinkan mobilitas sosial. Ketika ketimpangan terlalu besar, potensi manfaat dari efek ini bisa terhapus oleh hambatan struktural yang menyebabkan kelompok bawah kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Dengan demikian, manfaat dari ketimpangan sebagai insentif tetap bergantung pada keberadaan kebijakan yang memastikan inklusivitas dan keadilan ekonomi.

Negara Indonesia terkhususnya provinsi-provinsi di Pulau Sumatera masih mengalami ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera merupakan masalah struktural yang terkait dengan perbedaan ekonomi antar provinsi, ketergantungan pada sumber daya alam, dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Potensi yang dimiliki setiap daerah membantu pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri (Murialti, 2020).

Seperti yang diperlihatkan pada gambar 1.1 pada tahun 2014 provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan nilai ketimpangan pendapatan yang tinggi (0,419) dibanding provinsi-provinsi lainnya. Sementara itu Kepulauan Bangka Belitung mempunyai ketimpangan paling rendah (0,299). Pada periode 2015- 2020 beberapa provinsi seperti Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi dengan mendekati 0,4 hingga 0,45 dibanding provinsi lainnya. Bengkulu dan Lampung memperlihatkan ketimpangan yang lebih rendah dengan angka yang mendekati 0,25 hingga 0,3.

Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Beberapa provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tapi beberapa provinsi lainnya, seperti Aceh dan Bengkulu tumbuh dengan perekonomian yang lebih lambat. Penyebab ketimpangan ini antara lain adalah perbedaan sumberdaya, infrastruktur dan investasi yang

tentunya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang seterusnya akan kembali mempengaruhi ketimpangan pendapatan di masyarakat.



Gambar 1. 1 Gini Ratio Pulau Sumatera
Sumber: data diolah, 2024

Dalam merumuskan kebijakan terutama kebijakan pembangunan wilayah, penting untuk melihat bagaimana kondisi aktual berdasarkan pada data yang ada. Untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang secara simultan dapat menurunkan ketimpangan perlu dicermati beberapa faktor misalnya pertumbuhan ekonomi, *trade openness* (keterbukaan perdagangan), pembentukan modal tetap bruto, indeks harga konsumen, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Secara rata-rata pada tahun 2023 Pulau Sumatera berkontribusi sekitar 22% terhadap pembentukan PDB Indonesia yang didominasi oleh provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan.

Jika dibandingkan dengan Pulau lainnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama 19 tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan Pulau Sumatera. Ketimpangan di Pulau Jawa sebesar 0,43 sedangkan Pulau Sumatera sebesar 0,39. Meskipun ketimpangan lebih rendah dari Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Sumatera juga lebih rendah dari Pulau Jawa. Ostry et al., (2014) berpendapat bahwa ketika terjadinya penurunan ketimpangan maka akan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi ini tidak berlaku untuk pulau Sumatera. Sumatera dengan ketimpangan rendah dan pertumbuhan rendah, sementara Jawa dengan

ketimpangan tinggi dan pertumbuhan tinggi. Hal ini mencerminkan perbedaan struktural dalam sumber daya ekonomi dan model pembangunan antara kedua pulau tersebut.

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode panel ARDL dan mengadopsi model dari penelitian Wolde et al., (2022). Topik ini menjadi penting untuk dibahas karena bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan di Pulau Sumatera akan menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang tidak hanya fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi juga harus berdampak pada kesejahteraan individu di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak selalu menghasilkan kesejahteraan yang merata di suatu wilayah. Fenomena ini menarik untuk diteliti, terutama saat pertumbuhan ekonomi diikuti oleh kesenjangan yang signifikan antar provinsi-provinsi di Sumatera. Bagaimana faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, *trade openness*, pembentukan modal tetap bruto, indeks harga konsumen, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal ini menjadi penting diamati untuk melihat mana dari faktor-faktor tersebut yang bisa menjadi pendorong untuk menurunkan tingkat ketimpangan di Pulau Sumatera.

1.3 Tujuan Penelitian

Implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan masih menjadi perdebatan. Ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, *trade openness*, pembentukan modal tetap bruto, indeks harga konsumen, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera. Dengan beragamnya potensi yang dimiliki setiap provinsi di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam mengatasi ketimpangan.